



Program Raih Opini WTP

SUKADANA-RK. Dalam mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Aparatur Pemerintah Kabupaten Kayong Utara didorong untuk meningkatkan kinerja, tidak terkecuali dalam penatausahaan aset daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

"Pengelolaan dan manajemen aset merupakan hal mutlak harus dilak-



PEMBUKAAN. Sekda Kayong Utara, Hilaria Yusnani saat membuka sosialisasi barang milik daerah di Hotel Mahkota Kayong di Sukadana, Rabu (13/11). **Ka-**
MIRILUDDIN-RK

sanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah. Bagi Aparatur yang membidangi Aset Daerah saya harap pengelolaan barang milik daerah dapat dijalankan dengan baik, Mampu meminimalisir multi tafsir atas pengelolaan barang milik daerah, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan pengguna barang dan pengelola barang dapat dipertegas," kata Sekretaris Daerah (Sekda) KKU, Hj Hilaria Yusnani saat membuka sosialisasi barang milik daerah di Hotel Mahkota Kayong di Sukadana, Rabu (13/11).

Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang milik Daerah dan Permendagri tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, Hilaria menyebutkan bahwa barang daerah memiliki aturan dan siklus pengelolaan yang bersifat nasional; mulai dari perencanaan, perolehan, pengelolaan, sampai penghapusan dan ganti ruginya.

"Aset atau barang daerah merupakan sumber daya ekonomi milik daerah memiliki peran dan fungsi yang strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Aset yang ditata dan dikelola dengan baik dapat menjadi potensi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah serta dapat pula

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," terangnya.

Pentingnya Pengelolaan aset yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, Hilaria berharap pengelolaannya harus dilakukan secara baik, tertib dan sistematis.

Untuk mencapai tujuan tersebut sekda memandang perlu diadakan Sosialisasi untuk membekali para aparatur menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola aset daerah sesuai dengan peraturan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar laporan keuangan menuju good government atau pemerintahan yang baik.

"Untuk menunjang keberhasilan tata kelola barang milik daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, diperlukan dukungan, komitmen partisipasi dan tanggung jawab dari semua pihak. Untuk itu kami minta seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan sungguh-sungguh, agar dapat mencermati dan melaksanakan segala aturan dalam pengelolaan barang daerah, sehingga dapat memahaminya dengan baik dan melaksanakannya dengan benar, sebab para pengurus barang merupakan ujung tombak dalam pengelolaan aset daerah," pesannya. **(lud)**